

ANALISIS KEBIJAKAN BERAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN PETANI

Dhea Candra Dewi¹, Iswan², Nurwahidah³

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, ^{2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Niaga,
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Email: candradhea20@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the form of an effective program or policy in the availability and affordability of rice as the main staple food in order to increase food security as one of the priorities of national development and improve farmer welfare. The research method used is library research, namely research that uses written materials, such as manuscripts, books, magazines, newspapers, and other documentation, so that the data used is secondary data. Article data in this study were obtained from Google Scholar using the keywords rice policy, policy impact, rice policy analysis, implementation of rice price policy, and studies related to the research topic. Furthermore, the data obtained will be compiled, analyzed and concluded. The results of the study show that the length of the distribution chain from producers to consumers causes many unexpected additional costs and makes rice prices increasingly high and expensive. However, in reality, the high price for consumers does not make rice prices expensive in the hands of producers or farmers. In terms of achieving food security, it can be done by implementing a rice self-sufficiency policy which is a government priority in its agricultural development policy. The rice self-sufficiency policy is one of the main policies of agricultural development and is considered to have increased rice production and farmer income. However, in terms of fulfilling rice needs in Indonesia, it still faces a dilemma between efforts to meet domestic consumption needs by producing policies to increase productivity through rice import efforts, and efforts to maintain stable rice prices so that they remain affordable for all parties.

Key Words: *rice policy, food security, farmer welfare.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk program atau kebijakan yang efektif dalam ketersediaan dan keterjangkauan beras sebagai bahan pokok utama dalam rangka peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan petani. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumentasi lainnya, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Data artikel pada penelitian ini diperoleh bersumber dari Google Scholar dengan menggunakan kata kunci kebijakan beras, dampak kebijakan, analisis kebijakan beras, implementasi kebijakan harga beras, serta kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dikompilasi, dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjangnya rantai distribusi dari produsen kepada konsumen menyebabkan banyaknya tambahan biaya yang tak terduga dan membuat harga beras semakin naik dan mahal. Namun, pada kenyataannya mahalnya harga pada konsumen tidak membuat harga beras menjadi mahal di tangan produsen atau petani. Dalam hal mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan swasembada beras yang menjadi prioritas pemerintah dalam kebijakan pembangunan pertaniannya. Kebijakan swasembada beras merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian dan dinilai telah meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani. Namun, dalam hal pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia masih menghadapi dilema antara upaya mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan cara menghasilkan kebijakan peningkatan produktivitas melalui usaha impor beras, dengan upaya menjaga kestabilan harga beras agar tetap terjangkau oleh semua pihak.

Kata Kunci: *kebijakan beras, ketahanan pangan, kesejahteraan petani.*

Pendahuluan

Ketahanan pangan adalah kondisi dimana semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Ketahanan pangan merupakan jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan produktif. Adapun beberapa komponen ketahanan pangan meliputi: ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pasokan pangan. Ketahanan pangan juga merupakan fondasi utama dalam membangun kedaulatan dan kemajuan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kebijakan pangan juga dapat meliputi ketersediaan pasokan pangan dalam kuantitas dan kualitas yang baik serta keterjangkauan harga pangan oleh masyarakat dan aman untuk dikonsumsi. Pemerintah harus melihat bahwa ketahanan pangan akan terwujud apabila tiga dimensi utama dari ketahanan pangan yaitu: ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), dan keterjangkauan (*affordability*) oleh seseorang atau keluarga dapat terpenuhi. Pemerintah juga harus mampu mengintegrasikan kebijakan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan dengan kebijakan pembangunan nasional lainnya (Salasa, 2021). Ketahanan pangan menjadi penting karena diperkirakan jumlah penduduk di Indonesia yang saat ini sebesar 267 juta jiwa diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 319 juta jiwa di tahun 2045 mendatang (BPS, 2020).

Dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, beras sebagai bahan pangan utama merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis, baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, maupun politik. Melalui konteks ketahanan pangan, stabilitas pasokan dan harga beras menjadi salah satu unsur penting dalam pencapaian ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yang menghadapi persoalan di bidang pertanian, khususnya persoalan pangan. Pangan adalah kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Tidak adanya pangan dapat membuat manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya dan bermasyarakat (Sari, 2014). Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup merupakan salah satu penentu bagi tercapainya ketahanan pangan nasional. Pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia adalah kebutuhan akan beras. Sebagian besar dari penduduk Indonesia masih membutuhkan beras sebagai makanan pokoknya. Semakin bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah akan meningkatkan besarnya konsumsi pangan suatu daerah sedangkan berkurangnya lahan persawahan yang berubah fungsi menjadi perumahan atau industri dan juga adanya perubahan struktur ekonomi dari agraris ke non agraris akan mengakibatkan turunnya produksi padi. Hingga saat ini Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri sehingga masih tergantung pada impor (Rahayu, 2019).

Dalam hal ketahanan pangan untuk mencapai swasembada beras menjadi prioritas pemerintah dalam kebijakan pembangunan pertaniannya. Kebijakan swasembada beras

merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian dan dinilai telah meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani. Selama beberapa dekade Indonesia telah berjuang untuk mencapai swasembada beras namun hanya berhasil di pertengahan tahun 1980-an dan tahun 2008-2009 yang lalu. (Rahayu, 2016) Konteks ketahanan pangan tidak hanya menyangkut masalah ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat saja, tetapi meliputi pula bagaimana akses kepemilikan dan akses terhadap pangan itu oleh setiap anggota masyarakat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia menghadapi dilema antara upaya mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan cara peningkatan produktivitas dan impor beras, dengan upaya menjaga kestabilan harga beras agar tetap terjangkau oleh semua pihak (Sari, 2014).

Selain adanya kebijakan swasembada beras, ada juga kebijakan impor beras yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bahan pangan. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi masih minim dalam mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga Indonesia melakukan kebijakan impor untuk barang setengah jadi menjadi barang jadi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri bagi jumlah penduduknya yang cukup besar (Febrianty, 2016). Diketahui bahwa Indonesia mengimpor sebanyak 4,52 juta ton beras sepanjang 2024. Jumlah impor beras tersebut naik sekitar 47,38% dari catatan pada 2023 yang sebanyak 3,06 juta ton. Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), total impor beras pada 2024 itu menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Pada 2018, total impor beras sebanyak 2,25 juta ton, lalu pada 2019 hanya 444,51 ribu ton, 2022 menjadi 359,29 ribu ton, 2021 sebanyak 407,74 ribu ton, dan 2022 sejumlah 429,21 ribu ton (Rachman, 2024).

Hal lain juga dialami oleh petani / produsen beras yakni tentang kemampuan mendapatkan beras. Kendati berstatus sebagai produsen, sebagian petani padi kesulitan menjangkau beras yang harganya melonjak tinggi belakangan ini. Sebagian di antara mereka mesti berebut beras murah dalam operasi pasar dan menjadi sasaran program bantuan pangan dari pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga rata-rata beras nasional ditingkat pedagang grosir Rp 14.397 per kilogram, titik tertinggi baru pada Februari 2024. Angka itu merupakan yang tertinggi setidaknya sejak periode pencatatan Januari 2013 atau lebih dari satu dekade silam. Situasi itu amat tidak menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah bawah. Mereka menanggung dampak lebih besar dibandingkan kelompok menengah atas akibat kenaikan harga itu. Selama satu tahun terakhir, harga beras medium ditingkat penggilingan tercatat naik 25,3 persen menjadi Rp 11.161 per kg, sedangkan beras premium naik 22,9 persen menjadi Rp 14.525 per kg. Di antara mereka yang menanggung dampak terbesar akibat kenaikan harga beras adalah petani dan buruh tani padi. Sebab, mayoritas diantara mereka adalah konsumen bersih (*net consumer*) beras. Dengan pengeluaran yang sebagian besar untuk kebutuhan pangan, kenaikan harga beras dan sejumlah bahan kebutuhan pokok lain semakin menyulitkan mereka (Ashri dkk, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yakni bagaimana analisis kebijakan yang tepat dan sesuai atas ketersediaan beras dengan harga yang cukup terjangkau dalam rangka upaya ketahanan pangan nasional ? Dalam realita yang

ada, harga beras di Indonesia cenderung tinggi, namun kesejahteraan petani cenderung turun dan minim. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk program atau kebijakan lanjutan yang cukup efektif dalam ketersediaan dan keterjangkauan beras sebagai bahan pokok utama dalam rangka peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumentasi lainnya (Rahmadi, 2011), sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Data artikel pada penelitian ini diperoleh bersumber dari Google Scholar dengan menggunakan kata kunci kebijakan beras, dampak kebijakan, analisis kebijakan beras, implementasi kebijakan harga beras, serta kajian yang berkaitan dengan fenomena kenaikan harga beras di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dikompilasi, dianalisis dan disimpulkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, beras merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis, baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, maupun politik. Dalam konteks ketahanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga beras menjadi salah satu unsur penting dalam pencapaian ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional (Bappenas, 2010). Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi Indonesia, beras selalu diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, sosial, sekaligus politik. Kebijakan harga beras merupakan salah satu instrument terpenting dalam keseluruhan kebijakan perberasan nasional. Pemahaman atas dinamika perubahan kebijakan yang diambil oleh setiap era pemerintahan serta dampaknya bagi penyediaan pangan pokok beras merupakan kekayaan pengetahuan dalam upaya memahami keseluruhan kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Indonesia berargumentasi bahwa harga beras yang tinggi merupakan akibat dari panjangnya rantai distribusi untuk beras produksi dalam negeri (Ariyanti, 2016; Jefriando, 2016). Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, beras lokal dari petani melalui lima pelaku distribusi yang berbeda sebelum sampai ke konsumen.

Gambar 1. Tingkat distribusi beras Lokal di Indonesia



Sumber: (KPPU, 2016)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pradana, 2016) melaporkan bahwa sistem distribusi beras lokal di Indonesia menghadapi persaingan tidak sempurna dan monopolistik sebagaimana terlihat pada Gambar 1 diatas. Panjangnya rantai distribusi dari produsen kepada konsumen menyebabkan banyaknya tambahan biaya yang tak terduga dan membuat harga beras semakin naik dan mahal. Namun, pada kenyatannya mahalnya harga pada konsumen tidak membuat harga beras menjadi mahal di tangan produsen / petani lokal. Banyaknya tangan dalam tingkat distribusi beras yakni tengkulak dan makelar menjadi alasan utama hal itu dapat terjadi. Adanya praktek tengkulak yang berlapis dan makelar yang beraksi membuat banyaknya margin penjualan yang akhirnya merugikan para petani.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Kegiatan pengelolaan pangan oleh pemerintah seringkali mendapat kritik karena adanya ketidak-sempurnaan kegiatan-kegiatan intervensi itu sendiri yang disebabkan oleh kelemahan dalam proses penyusunan kebijakan maupun karena akibat yang akan menimbulkan distorsi pasar. Dalam perkembangannya, masalah beras memang akan selalu merupakan salah satu masalah terpenting dalam perekonomian Indonesia. Bahkan lebih dari itu, segala masalah yang akan timbul baik dibidang harga, produksi dan penyediaan, konsumsi maupun impor akan selalu menyangkut kepentingan dan meminta perhatian berbagai pihak (Gapari, 2021). Dari sisi tingkat konsumsi beras, yang terjadi akibat besar konsumsi selalu mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Konsumsi beras di Indonesia harus diimbangi dengan produksi beras sehingga mencukupi kebutuhan nasional. Kondisi ketika kebutuhan nasional akan beras tidak terpenuhi maka pemerintah akan mengambil sebuah kebijakan, contohnya kebijakan impor beras (Puspitasari dkk, 2020).

Selain jumlah konsumsi beras, beragamnya kebijakan yang ada, hal lain juga terjadi pada petani yang petani sebagai sumber daya penghasil beras juga seringkali mendapatkan permasalahan yang serupa. Petani di Indonesia dipandang belum mencapai kesejahteraan saat ini lantaran rata-rata pendapatan USD 1 per hari atau USD 341 pertahun berdasarkan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) Badan Pusat Statistik (BPS). Jika dikonversikan ke rupiah,

pendapatan petani di Indonesia hanya mencapai Rp 5,16 juta pertahunnya (dengan kurs Rp 15.160 per dolar AS). Angka ini jauh di bawah rata-rata UMP (Upah Minimum Provinsi) di RI pada 2024 yang sebesar Rp 37,36 juta per tahun atau Rp 3,11 juta per bulan. Rendahnya pendapatan petani ini bahkan menjadi perhatian bank dunia. Berdasarkan laman BPS, harga gabah di tingkat petani pada Agustus 2024 mengalami kenaikan, untuk kualitas gabah kering giling sebesar 2,04 persen jadi Rp 6.725 per kg dan gabah kering panen sebesar 1,58 persen jadi Rp 6.230 per kg. Kenaikan harga gabah ini juga otomatis diikuti oleh kenaikan harga beras. Bahkan harga beras Indonesia 20 persen lebih tinggi daripada harga beras di pasar global (kumparan bisnis, 2024).

Adapun salah satu penyebab rendahnya pendapatan petani di Indonesia antara lain dikarenakan terjadinya kelangkaan pupuk. Secara umum kelangkaan pupuk terjadi sebagai akibat dari perang antar Rusia dan Ukraina yang telah memberikan dampak besar bagi ketersediaan dan stabilitas harga pupuk dunia. Hal ini disebabkan kedua negara tersebut merupakan negara terbesar pemasok unsur terpenting dalam produksi pupuk yaitu fosfat dan kalium. Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Permentan tersebut ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2022 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Terdapat beberapa perubahan kebijakan yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas, terutama para petani. Diantaranya, komoditas yang disubsidi sebelumnya berjumlah lebih dari 60 jenis, dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 kini mengatur penyaluran pupuk bersubsidi diprioritaskan pada 9 komoditas utama berdasarkan kebutuhan pangan pokok negara. Sembilan komoditas utama yang dimaksud adalah *Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kopi, Tebu, dan Kakao*, dengan luas kepemilikan lahan maksimal 2 Ha per petani. (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Kuningan, 2023).

Faktor lain yang membuat harga beras semakin meningkat yakni usaha penggilingan dari petani kepada tengkulak sebelum pada akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Sejak beberapa tahun terakhir banyak penggilingan padi skala rakyat terpaksa gulung tikar. Fenomena ini paling banyak terjadi di sentra-sentra beras seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Suratto Alimoeso menjelaskan penyebab banyaknya penggilingan padi skala kecil yang tutup dikarenakan pasokan gabah di tingkat petani yang merosot. "Penyebab jumlah padi (yang digiling) tidak berrimbang. Suplai padinya sedikit sementara kapasitas produksi penggilingan jauh diatas produksi gabah dalam negeri. Produksi padi saat ini sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling dalam setahun, angka ini jauh dibawah kapasitas giling dari semua penggilingan gabah di Indonesia yang mencapai 225 juta ton. (Money.Kompas, 2024). Masalah yang dihadapi para penggilingan padi kecil tak hanya berhenti disitu saja, pengusaha penggilingan rakyat juga babak belur bersaing dengan penggilingan padi bermodal besar.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras menetapkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) beras ditetapkan berdasarkan

wilayah dengan rata-rata kenaikan harga sebesar Rp 1.000 per kg, beras terdiri atas beras medium dan beras premium. Kisaran harga beras medium berada pada harga Rp 12.500 – Rp 13.000 per kg sedangkan untuk harga beras premium yakni berada pada harga Rp 14.500 – 15.800 per kg. Hal ini berdasarkan harga eceran masing-masing wilayah yang bervariasi.

Dalam kebijakan impor beras yang dikeluarkan oleh pemerintah, Indonesia tercatat masih mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, Tiongkok, Amerika dan beberapa negara lainnya. Nilai defisit perdagangan pangan itu semakin besar bila diperhitungkan sejak 2 tahun lalu dimana Indonesia pernah defisit *horticultural* tanpa beras. Sikap pemerintah yang cenderung mengambil jalan pintas melalui impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebenarnya sangat disayangkan karena Indonesia mampu berswasembada pangan mengingat potensi lahan pertanian di Indonesia cukup besar dan subur, potensi tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Defisit perdagangan komoditas pangan sungguh ironis dikarenakan Indonesia adalah negara agraris dan memiliki lahan pertanian yang luas dan sebelumnya mencapai swasembada pangan Indonesia sulit menghentikan impor bahan pangan karena produksi dalam negeri belum mencukupi dan seharusnya pemerintah memiliki *grand design* yang benar dan jelas untuk menyukseskan program keamanan pangan dan Indonesia juga tidak bisa hanya berpaku pada sektor pertanian untuk memproduksi bahan pokok pangan, tetapi juga mengembangkan makanan olahan. Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), total impor beras pada 2024 itu menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Pada 2018, total impor beras sebanyak 2,25 juta ton, lalu pada 2019 hanya 444,51 ribu ton, 2022 menjadi 359,29 ribu ton, 2021 sebanyak 407,74 ribu ton, dan 2022 sejumlah 429,21 ribu ton. Beras yang diimpor Indonesia pada 2024 itu paling banyak dalam bentuk golongan barang HS 10063099 berupa beras setengah giling atau beras giling utuh, baik yang dipoles atau diglasir maupun tidak dengan volume 3,99 juta ton. Adapun untuk negara asal impor beras tersebut, paling banyak dari Thailand sebesar 1,36 juta ton atau setara 30,19% dari total impor beras. Urutan kedua berasal dari Vietnam dengan volume impor sebesar 1,25 juta ton atau setara 27,62%.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan nasional, terutama beras sekaligus peningkatan kesejahteraan petani diperlukan beberapa Langkah kebijakan. Langkah kebijakan tersebut diantaranya: masih diperlukan kebijakan perlindungan petani dengan pembatasan impor beras, mengurangi atau memotong oanjangnya rantai distribusi beras dari produsen kepada konsumen, dapat juga dilakukannya peningkatan lahan pertanian sehingga petani di Indonesia mampu memperbanyak hasil pertanian berupa gabah / beras yang juga tentunya akan disokong dnegan ketresediaan subsidi pupuk yang memadai. namun hendaknya didukung pula dengan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi Untuk selanjutnya kebijakan pembatasan impor tersebut dapat dikurangi secara bertahap dengan peningkatan produksi domestik yang masih diperlukan yang disertai dengan upaya penganeka-ragaman konsumsi atau pangan sehingga mengurangi

tekanan pada ketersediaan satu macam produk pangan, terutama beras. Konsekuensinya, keanekaragaman ketersediaan bahan pangan perlu ditingkatkan pula dengan didukung agroindustri pengolahan pangan non-beras yang berbasis produk dalam negeri agar dapat tersedia dan mudah diperoleh dimana saja.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan **pertama** agar institusi pemerintah sebagai ujung tombak kebijakan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan agar lebih berfokus pada investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan dibidang pertanian. Adapun usaha yang dapat usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian meliputi penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah, pemakaian dan penggunaan alat-alat, pemakaian bibit unggul, pemakaian pupuk, pemakaian pestisida atau pemberantasan hama dan penyakit penyuluhan pertanian, pemakaian bibit unggul, pemakaian pestisida, pengolahan tanah diterapkan petani dengan baik dan benar dan sebagainya. **Kedua**, institusi pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Pertanian mungkin dapat meningkatkan luas tanam dengan cara mengalirkan air dari air permukaan terdekat ke lokasi persawahan. Selain itu, juga dapat melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan sawah tadah hujan serta pemanfaatan lahan perkebunan untuk padi. **Ketiga**, pemerintah diharapkan mampu menciptakan rantai distribusi yang lebih sederhana dengan memangkas praktik tengkulak dan makelar beras dan sistem yang panjang dimana akhirnya justru akan mmebuat petani sebagai pihak produsen beras menjadi merugi. Hal ini dapat ditempuh dengan menghadirkan perwakilan dari pemerintah untuk menjual hasil panen pertanian dalam setiap daerah.

Daftar Pustaka

- Ariyanti, F. 2016. Ini Penyebab Harga Bahan Pangan di RI Mahal, dari website <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2425928/ini-penyebab-harga-bahan-pangan-di-ri-mahal>.
- Ashri, Fikri, dkk. Maret, 2024. Lonjakan Harga Beras Turut Pukul Petani. Dari website <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/03/lonjakan-harga-beras-turut-pukul-petani>.
- Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJHMN) 2010- 2014 (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- BPS. 2020. Data Kependudukan 2020. Jakarta . BPS
- Febriaty, H. (2016). Analisis Perkembangan Impor Beras di Indonesia. EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 16(2), 134-141.

- Gapari, Muhamad Zaryl. (2021). Pengaruh Kenaikan Harga Beras Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Sukaraja. *PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 14-26.
- Kumparan Bisnis, 2024. BPS Catat Harga Beras di Penggilingan Naik di Juni 2024. Dari website <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bps-catat-harga-beras-di-penggilingan-naik-di-juni-2024-232s5NF66Xi>.
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.
- Pradana, R. S. 2016. Dugaan Kartel Beras, KPPU: Pedagang Besar Berisiko Oligopoli. Dari website <http://industri.bisnis.com/read/20151112/12/491551/dugaan-kartel-beras-kppupedagang-besar-berisiko-oligopoli>.
- Puspitasari, Niken dkk. (2020). Analisis Pengaruh Harga beras, Cadangan Devisa. Dan Rata-Rata Konsumsi Beras per Kapita Seminggu Terhadap Import Beras di Indonesia Tahun 2008-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 1(1), 55- 67.
- Rachman, Arrijal. Desember, 2024. Impor Beras RI Sepanjang 2024 Tembus 4,52 Juta Ton. Ini Pemasoknya! Dari website <https://www.cnbcindonesia.com/news/>.
- Rahayu, Sri Endang, dkk, (2019). Analisis Perkembangan Produksi Beras Dan Impor Beras Di Indonesia. *Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), hal 219-226 Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ISSN 2714-8785 DOI: <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3613>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Salasa, Andi Rachman. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategis Ketahanan Pangan Indonesia. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35-48.
- Sari, R. (2014). Analisis Impor Beras Di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3838>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Yeniarta. 2024. Kementan Optimalkan Upaya Peningkatan Produksi Beras. Dari website: <https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/blog/post/kementan-optimalkan-upaya-peningkatan-produksi-beras>.